

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Terhadap Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. (Jakarta: Kencana, Cet. 4, 2012).
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. (Jakarta: Konstitusi Press, 2006).
- Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2010).
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengadilan Khusus dalam Tim Penyusun Komisi: Yudisial Putih Hitam Pengadilan Khusus*. (Jakarta: Pusat Analisis dan Layanan Informasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, 2013).
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2013).
- Fauzan, Achmad. *Perundang-Undangan Lengkap tentang Peradilan Umum, Pengadilan Khusus, dan Mahkamah Konstitusi*. (Jakarta: Kencana, 2009).
- Hadikusuma, Hilman. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. (Bandung: Mandar Maju, 1995).
- Hamidi, Jajim. *Hukum Lembaga Kepresiden Indonesia*. (Bandung: PT. Alumni, 2010).
- Harman, Benny K. *Mempertimbangkan Mahkamah Konstitusi: Sejarah Pemikiran Pengujian UU Terhadap UUD*. (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2013).
- Isra, Saldi. *Lembaga Negara: Konsep, Sejarah, Wewenang, dan Dinamika Konstitusional*. (Depok: PT. RajaGrafindoPersada, 2021).
- Martitah. *Mahkamah Konstitusi: Dari Negative Legislature ke Positive Legislature*. (Jakarta: Konstitusi Press, 2013).
- MD, Mahfud. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Keadilan*. (Jakarta: LP3ES, 2006).
- Moleong, Lexy. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2000).
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985).

- Rahardjo, Satjipto, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*. (Semarang: Undip Press, 2006).
- Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan*. (Yogyakarta: Kanisus, 2007).
- Soimin, Mashuriyanto. *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2013).
- Sutopo, HB. *Pengantar Penelitian Kualitatif*. (Surakarta: UNS Press, 1998).
- Thalib, Abdul Rasyid. *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006).
- Tim Pengkajian Hukum Tentang Hubungan Antar Lembaga Negara, *Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Hubungan Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945*. (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2005).
- Tutik, Titik Triwulan. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2010).
- Utsman, Sabian. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*. (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009).

Jurnal dan Artikel

- Agus M., Maulidi. "Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Konstitusi*. Vol. 16, No. 2. Juni 2019.
- Arbie, Ardiansyah. "Sifat Final dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Asas *Erga Omnes*". *Lex Privatum*. Vol. 13, No.1, Januari 2024
- Bachtiar. "Esensi Paham Konsep Konstitusionalisme dalam Konteks Penyelenggaraan Sistem Ketatanegaraan". *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*. Vol. 6, No. 1. Maret 2016.

- Chakim, M. Lutfi. "Mewujudkan Keadilan Melalui Upaya Hukum Peninjauan Kembali Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Konstitusi*. Vol. 12, No. 2. Juni 2015.
- Harjono, Dhaniswara., dkk. "Perpu Nomor 2 Tahun 2022: Antara Kegentingan yang Memaksa dan Putusan Mahkamah Konstitusi". *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*. Vol. 8, No. 2. Februari 2023.
- Hasibuan, Ali Marwan. "Tindak Lanjut Lembaga Legislatif Atas Putusan Mahkamah Konstitusi yang Membatalkan Ketentuan dalam Undang-Undang". *Jurnal Hukum Perancang Peraturan Perundang-Undangan*. Vol. 2, No. 1. 2016.
- Hidayat, Arief. "Negara Hukum Berwatak Pancasila". Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
https://www.mkri.id/public/content/infoumum/artikel/pdf/artikel_15_03_arief_hidayat.pdf, diakses pada 6 Februari 2025.
- Iswandi, Kelik., Prasetyoningsih, Nanik. "Kedudukan *State Auxiliary Organ* dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia". *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*. Vol. 1, No. 2. September 2020.
- Limbach, Jutta. "The Concept of The Supremacy of the Constitution". *The Modern Law Review*. Vol. 64, No. 1. Januari 2001.
- Maas, Marwan. "Menggagas Perubahan Kelima Undang-Undang Dasar 1945". *Jurnal Hukum Prioris*. Vol. 3, No. 1. Januari 2012.
- Malik. "Telaah Makna Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat". *Jurnal Konstitusi*. Vol. 6, No. 1. April 2009.
- Nggilu, Novendri M. "Menggagas Sanksi atas Tindakan *Constitutional Disobedience* terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Konstitusi*. Vol. 14, No. 1. 2019.
- Novlarang, Putra Diyan. "Urgensi Penerapan *Constitutional Question* di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Menjamin Hak-Hak Konstitusional Warga Negara (*The Protector of Citizen's Constitutional Rights*). *Diponegoro Law Journal*. Vol. 8, No. 2. 2019.
- Pratiwi, Endang. "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum". *Jurnal Konstitusi*. Vol. 19, No. 2. Juni 2022.

- Sihombing, Eka., Cynthia Hadita. "Bentuk Ideal Tindak Lanjut Atas Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang". *Jurnal APHTN-HAN*. Vol. 1, No. 1. Januari 2022.
- Soeroso, F Soeroso. "Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia". Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. https://pusdik.mkri.id/materi/materi_30_MK%20Dalam%20Sistem%20Ketatanegaraan%20RI.pdf, diakses pada 20 Februari 2025.
- Soeroso, Fajar Laksono. "Pembangkangan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Yudisial*. Vol. 6, No. 3. Desember 2013.
- Sulistiyowati, Tri, dkk. "*Constitutional Compliance* atas Putusan Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi oleh Addresat Putusan". *Jurnal Konstitusi*. Vol. 17, No. 4. Desember 2023.
- Syarifuddin., Novario. Kemas Gerby. "Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dan Penegakkan Kode Etik DPR RI". *Kajian*. Vol. 22, No. 1. Maret 2017.
- Tauda, Gunawan A. "Kedudukan Komisi Negara Independen dalam Struktur Ketatanegaraann Republik Indonesia". *Jurnal Pranata Hukum*. Vol. 6, No. 2. 2011.
- Utomo, Nurrahman Aji. "Dinamika Hubungan Antara Pengujian Undang-Undang dengan Pembentukan undang-Undang". *Jurnal Konstitusi*. Vol. 12, No. 4. Desember 2015.
- Wiyanto, Andy. "Kekuasaan Membentuk Undang-Undang dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945". *Jurnal Negara Hukum*. Vol. 6, No. 2. November 2015.

Disertasi, Skripsi, Tesis

- Irsyad, Muhammad. (2023, Skripsi, Universitas Sebelas Maret). *Analisis Tindakan Constitutional Disobedience Pemerintah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020)*.
- Sari, Elma Saida Rahma. (2021, Skripsi, Universitas Mataram). *Implikasi Yuridis Pembangkangan Konstitusi (Constitutionalism Disobedience) Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi*.
- W. Ekatjahjana. (2015, Tesis, Universitas Jember). *Negara Hukum, Konstitusi, dan Demokrasi: Dinamika dalam Penyelenggaraan Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*.

Internet

Indonesia Judicial Research Society. “Bagaimana Penghinaan Terhadap Pengadilan Diatur di Indonesia”. <https://ijrs.or.id/en/2023/12/01/explainer-bagaimana-penghinaan-terhadap-peradilan-diatur-di-indonesia/>, diakses pada 16 Maret 2025.

Jayanti, Dian Dwi. “Definisi *Contempt Court*”. *Hukumonline*, 28 Desember 2022. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/definisi-contempt-of-court-lt514052dfdcf3b/>, diakses pada 10 Maret 2025.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. “Kamus Besar Bahasa Indonesia”. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

Situs Resmi Pemerintah Inggris. <https://www.gov.uk/contempt-of-court>, diakses pada 12 Maret 2025.

Yasin, Muhammad. “Putusan MK Tidak Ditindaklanjuti, Langkah-Langkah Ini Perlu Diambil”. *Hukumonline*, 7 November 2021. <https://www.hukumonline.com/berita/a/putusan-mk-tidak-ditindaklanjuti--langkah-langkah-ini-perlu-diambil-lt6187006f6e277/>, diakses pada 16 Maret 2025.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat.

Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.